

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terpaan media sosial memiliki korelasi yang signifikan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik. Instagram dan TikTok, dengan algoritma yang menyesuaikan konten berdasarkan minat pengguna, memungkinkan informasi terkait keterbukaan publik tersebar luas dalam waktu singkat. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian ini terdapat dua aspek utama yang mempengaruhi terpaan media, yakni frekuensi dan atensi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman, keterlibatan, dan partisipasi Generasi Z dalam kebijakan keterbukaan informasi publik.

1. Pemanfaatan Instagram dan TikTok sebagai media sosial untuk menyampaikan kebijakan keterbukaan informasi publik memiliki potensi besar bagi Generasi Z, terutama dalam mempermudah pemahaman hak akses informasi melalui konten visual. Perhatian Generasi Z terhadap informasi yang disampaikan pemerintah sangat bergantung pada cara penyajiannya. Konten yang menarik, seperti video pendek, infografis, serta interaksi melalui sesi live dan Q&A, sudah mulai digunakan, tetapi belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif.
2. Hambatan yang ditemukan adalah meski frekuensi penggunaan media sosial cukup tinggi, interaksi aktif masih rendah, dengan mayoritas hanya memberikan tanda suka tanpa berkomentar atau membagikan informasi. Hal ini mencerminkan

rendahnya literasi digital dan kesadaran yang terbatas mengenai pentingnya partisipasi dalam diskusi publik. Ditemukan pula masih hadirnya rasa skeptis dari Generasi Z terhadap institusi pemerintahan dan kekhawatiran akan respons yang kurang memadai terhadap pertanyaan atau masukan yang diberikan.

Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang, media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, memainkan peranan penting dalam meningkatkan aksesibilitas informasi dan membangun kepercayaan publik. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatif dari misinformasi dan hoaks yang beredar di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran media sosial dalam kebijakan ini mencakup beberapa dimensi, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- Faktor komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan mendorong secara penuh efektivitas penggunaan media sosial oleh Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Media sosial terbukti efektif dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat, di mana Pemerintah Kota Semarang berkomitmen menjaga frekuensi unggahan dengan konten yang beragam dan *up-to-date*, guna menarik minat Generasi Z. Sementara itu, faktor struktur birokrasi mendukung keberhasilan tersebut dengan diterapkannya prosedur operasional standar (SOP) yang sistematis serta kolaborasi tim yang efektif. Pemahaman peran yang jelas

dalam tim pemerintah memungkinkan mereka untuk menyajikan informasi yang relevan, responsif terhadap tren yang berkembang, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Masih ditemukan hambatan yakni dalam faktor sumber daya dan faktor disposisi. Faktor sumber daya menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengelola media sosial bergantung pada kompetensi staf namun hingga saat ini masih terdapat keterbatasan pelatihan digital bagi staf yang hanya dilakukan setahun sekali. Minimnya program pelatihan yang berkelanjutan menyebabkan pegawai lebih bergantung pada inisiatif pribadi dalam mengembangkan keterampilan digital mereka. Di sisi lain, masih terdapat sikap ambivalen dari responsivitas pemerintah terhadap Generasi Z di media sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan terpaan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, sangat signifikan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang, terutama di kalangan Generasi Z. Melalui platform-platform ini, pemerintah dapat menyampaikan informasi secara efektif dan menarik, yang sejalan dengan kebutuhan generasi muda yang mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi. Dengan memanfaatkan potensi media sosial secara optimal dan memperkuat dimensi-dimensi tersebut, diharapkan pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetapi juga mendorong partisipasi aktif Generasi Z dalam proses pemerintahan. Keberhasilan

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di era digital ini menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, keberhasilan Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sangat dipengaruhi oleh dimensi komunikasi yang efektif, sumber daya manusia yang terampil, disposisi masyarakat dan pelaku kebijakan yang kritis, serta struktur birokrasi yang fleksibel walaupun sudah berjalan dengan baik, tetapi keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat generasi Z di Kota Semarang masih dapat digolongkan rendah karena adanya skeptis buruk kepada pemerintahan, generasi Z lebih sering hanya menjadi penonton tetapi tidak ikut berkomentar ataupun mengikuti dialog secara terbuka yang biasanya disediakan oleh pemerintah di media sosialnya. Untuk itu, penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan untuk dapat dilakukan oleh Diskominfo Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap data penggunaan media sosial oleh Generasi Z di Kota Semarang untuk memahami pola konsumsi informasi mereka. Hal ini akan membantu pemerintah dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi generasi muda.

2. Penting bagi pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di kalangan Generasi Z. Influencer dapat membantu menyebarkan informasi terkait kebijakan publik dengan cara yang menarik dan relevan, sehingga meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan konten yang interaktif dan menarik di media sosial, seperti video pendek di TikTok atau infografis di Instagram, yang dapat memudahkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.
3. Program pendidikan literasi digital harus diprioritaskan untuk membantu Generasi Z memahami cara mengakses dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Mengingat bahwa dari mereka menggunakan media sosial untuk mencari informasi, edukasi tentang cara mengenali disinformasi dan memahami konteks informasi publik menjadi sangat penting. Ini akan memberdayakan mereka untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan aktif dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintah.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi publik harus dilaksanakan secara berkala. Ini akan memastikan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran media sosial dapat dimaksimalkan dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota

Semarang, sehingga masyarakat terutama generasi Z dapat lebih terlibat dalam proses demokratisasi dan pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka.